

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA (MUSRENBANG) PADA DESA
TANJUNG ANOM KECAMATAN
PANCUR BATU**

SKRIPSI

Oleh :

WAHYU TIFFANI
13 852 009



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang
Pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu

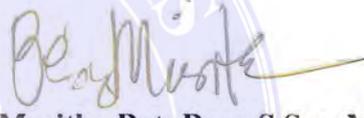
Nama Mahasiswa : Wahyu Tiffani

NPM : 13 852 0009

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP
Pembimbing I


Beby Masitho BatuBara S.Sos, MAP
Pembimbing II

Mengetahui:



Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus: 15 Juni 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

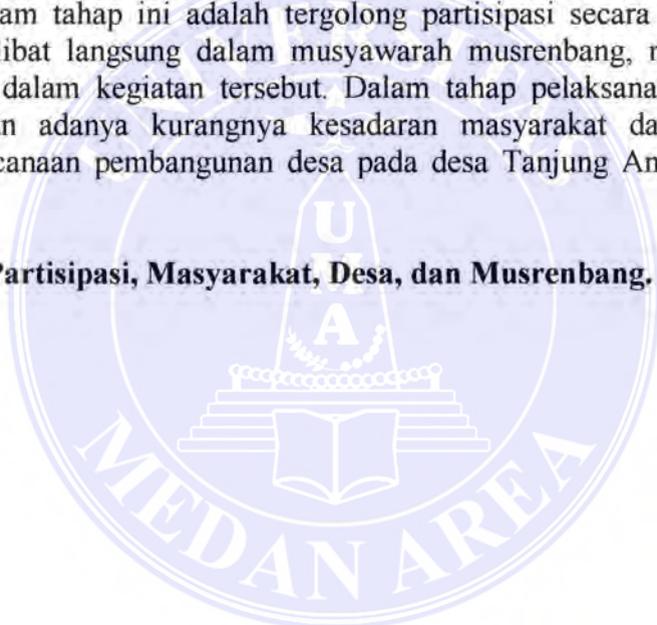
Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan pembangunan di daerah di perlukan berbagai tahapan yang pada dasarnya dimulai dari kegiatan perencanaan. Baik atau buruknya perencanaan yang diterapkan tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran tentang partisipatif masyarakat pada Musrenbang di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam musrenbang yaitu partisipasi Masyarakat dalam tahap persiapan Musrenbang yakni pada saat pelaksanaan Musrenbang mensosialisasikan terkait rencana pelaksanaan Musrenbang. Bentuk Partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah tergolong partisipasi secara langsung yaitu masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah musrenbang, masyarakat ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan musrenbang ditandai dengan adanya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan desa pada desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu.

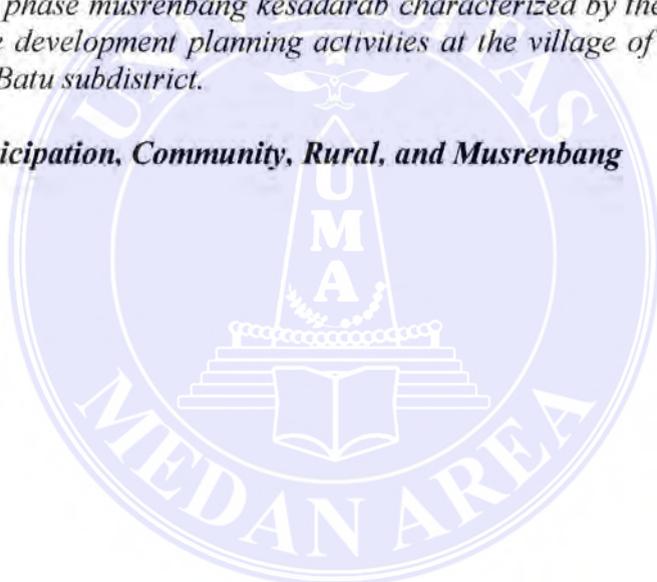
Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Desa, dan Musrenbang.



ABSTRACT

Regional development planning is one instrument that is the key to successful implementation of the development in the area. To carry out the construction in the area in need of various stages are basically starting from the planning activity. Good or bad planning which applied would be very big influence on the success or failure of regional development itself. This study used a qualitative approach. This approach was chosen because researchers want to gain an overview of community participation in planning forums in Tanjung Anom Pancur Batu subdistrict. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data processing techniques through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the discussion on public participation in musrenbang namely: Public Participation in the preparation stage Musrenbang namely during the implementation of the plan related Musrenbang Musrenbang socialize. Forms of public participation in this phase are classified as direct participation of the community that is directly involved in deliberations musrenbang, people participate in these activities. In the implementation phase musrenbang kesadaran characterized by the lack of people in following the development planning activities at the village of Tanjung Anom village Pancur Batu subdistrict.

Keywords: Participation, Community, Rural, and Musrenbang



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata I (S1) Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M Arif Nasution, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP selaku Dosen Pembimbing 1, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, MAP selaku Sekertaris yang membantu dalam penulisan skripsi ini berlangsung.
5. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik yang telah membantu penulisan dalam menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
6. Semua Mahasiswi/mahasiswa kelas Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area angkatan 2013 yang telah banyak membantu dan memberi masukan pada skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

iii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

7. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan peneliti terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Medan, 15 Juni 2017



Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pembatasan Masalah.....	4
1.3. Perumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Partisipasi.....	6
2.1.1. Tujuan Partisipasi	6
2.1.2. Jenis-Jenis Partisipasi	8
2.1.3. Teori Partisipasi menurut Para Ahli	10
2.1.4. Bentuk Partisipasi.....	11
2.2. Teori Pembangunan	11
2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	14
2.4. Perencanaan Pembangunan.....	17
2.5. Definisi Musrenbang.....	20
2.5.1. Tujuan Musrenbang	21
2.5.2. Prinsip Dalam Pelaksanaan Musrenbang	22
2.5.3. Proses Musrenbang	22
2.6. Desa.....	25
2.6.1. Penegrtian Desa	25

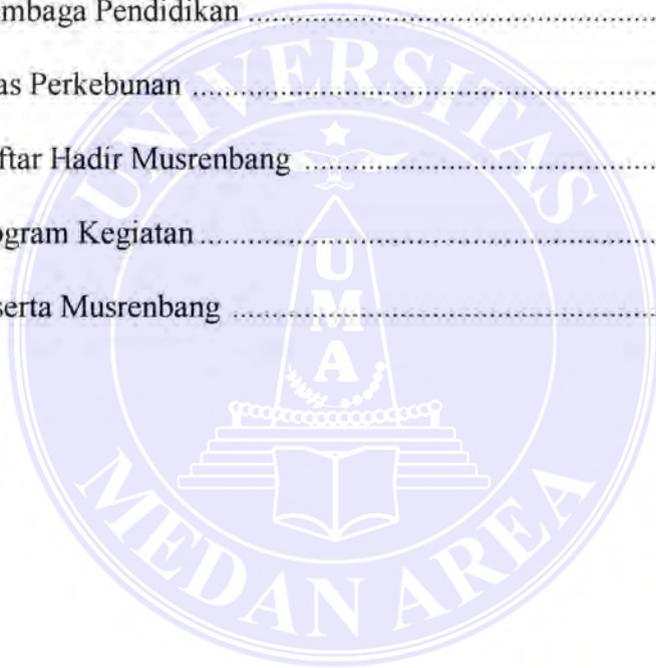
2.6.2. Pemerintahan Desa	26
2.7. Penelitian Terdahulu	29
2.8. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
3.3. Informan Penelitian.....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5. Teknik Analisis Data.....	35
3.5.1. Reduksi Data.....	35
3.5.2. Penyajian Data.....	36
3.5.3. Penarikan Kesimpulan.....	36
3.6. Uji Keabsahan Data.....	36
3.6.1. Kredibilitas.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1. Kondisi Geografis	38
4.1.2. Kondisi Demografi.....	41
4.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	44
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
4.2.1. Musrenbang Desa Tanjung Anom Tahun 2016.....	47
4.2.1.1. Pra Musrenbang.....	48
4.2.1.2. Pelaksanaan dan Hasil Pra Musrenbang.....	49
4.2.1.3. Menyusun Jadwal Agenda Musrenbang.....	50
4.2.1.4. Tim Pelaksana Musrenbang.....	51
4.2.1.5. Pelaksanaan Musrenbang.....	52
4.2.1.6. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang.....	54
4.2.1.7. Proses Pelaksanaan Musrenbang	55
4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang.....	55
4.4. Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang 2016.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Luas dari Desa Tanjung Anom	38
Tabel 4.2. Penduduk Berdasarkan Agama	41
Tabel 4.3. Penduduk Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 4.4. Mata Pencarian.....	43
Tabel 4.5. Tempat Ibadah	44
Tabel 4.6. Lembaga Pendidikan	46
Tabel 4.7. Luas Perkebunan	47
Tabel 4.8. Daftar Hadir Musrenbang	48
Tabel 4.9. Program Kegiatan	50
Tabel 4.10. Peserta Musrenbang	56



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Bagan Organisasi dan Tata Kerja.....	40
Gambar 4.2. Diagram Peserta Musrembang.....	56
Gambar 4.3. Diagram Hasil Pelaksanaan Musrenbang.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang adalah perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Dalam musrenbang Desa, pemerintah Desa dan warga berembung dalam menyusun program tahunan di Desa, musrenbang Desa menjadi media dialog dan

penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah desa tersebut, baik yang ditangani secara swadaya, dan melalui pos bantuan daerah.

Kegiatan musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan akan dilaksanakan. Musrenbang hendaknya dipandang sebagai saluran resmi yang dipersiapkan untuk menganalisis aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Untuk itu, maka mutu proses dan mutu hasil Musrenbang akan sangat menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa musrenbang bersifat partisipatif. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.

Partisipasi menjadi sangat penting kedudukannya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan hal yang utama karena perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan program agar program yang disusun dapat mengakomodasi segala kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Program pembangunan yang disusun hendaknya berdasarkan keinginan masyarakat bukan berdasarkan kelompok tertentu.

Setiap Desa di Indonesia wajib melakukan Musyawarah Perencanaan pembangunan atau biasa kita sebut dengan Musrenbang. Dalam pengadaan Musrenbang masyarakat harus berpartisipasi dalam Musrenbang tersebut, termasuk di Desa Tanjung Anom.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Desa Tanjung Anom Tanggal 10 Oktober 2016 ini bahwa pada tahun 2015 partisipasi masyarakat dalam upaya Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa ini sangat rendah sehingga banyak sekali kendala yang terjadi dan akhirnya Musrenbang pada tahun tersebut pun tidak dapat berjalan dengan baik. Angka partisipasi masyarakat pada tahun 2015 hanya mencapai 10% saja sehingga tidak dapat berjalan dengan baik pembangunan tersebut. Padahal petunjuk pelaksanaan Musrenbang ini disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Musrenbang Desa Tanjung Anom. Masih banyak masalah yang terjadi seperti sarana dan infrastruktur yang kurang memadai, seperti pembuatan *Drainase* (parit) yang belum merata sehingga masih sering terjadi banjir saat hujan deras, *Paving blok* (pengecoran) pada jalan raya maupun gang, normalisasi parit besar, dan normalisasi sungai kecil di Desa Tanjung Anom.

Dalam Musrenbang, maka masyarakat dapat berpartisipasi untuk memasukkan agenda-agenda kebutuhan sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili. Pentingnya partisipasi masyarakat tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi adalah bagian dari demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan

pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dengan itu, maka judul penelitian ini

adalah **“Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu.**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Tanjung Anom dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2016.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam jalannya proses Musrenbang Desa Tanjung Anom tahun 2016.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam jalannya Musyawarah perencanaan pembangunan pada Desa Tanjung Anom?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Tahun 2016.

I.5. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti berharap agar penelitiannya memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang didapat peneliti yaitu untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama berada di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di lapangan, serta bertambahnya wawasan mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi Pemerintah Desa Tanjung Anom adalah sebagai masukan dan referensi mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Partisipasi

Simatupang dalam Yuwono (2001 : 124) menyatakan : Ada beberapa pengertian partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi

Suryono (2001 : 124) Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, memanfaatkan, menikmati hasil pembangunan.

2.1.1. Tujuan Partisipasi

Menurut Schiller dan AntlovdalamHetifah (2003:152) (www.materibelajar.id) tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan visi bersama

Merumuskan visi dan mandate serta nilai-nilai yang dilanut atau menjadi dasar suatu organisasi serta visi itu kedepan. Tujuannya adalah menyajikan

kebenaran yang definit,tapi lebih untuk menstimulasikan debat dan bagaimana mempengaruhi ke masa depan.

2. Membangun rencana

Setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentuka tujuan spesifik yang ingin dicapai. Maka, dengan bekal itu dapat segera dibuat suatu proses lanjutan untuk membangun rencana.

3. Mengumpulkan gagasan

Dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis,dengan maksud mengumpulkan sebanyak-banyaknya gagasan dari semua orang yang menjadi peserta proses partisipasi.

4. Menentukan Prioritas/ memuat pilihan

Bertujuan untuk mengorganisir berbagi ide yang muncul dalam proses partisipasi dengan memanfaatkan kualitatif.

5. Menjaring Aspirasi/masukan

Bertujuan untuk pertukaran informasi,gagasan dan kepedulian tentang suatu isu atau rencana antara pemerintah, perencanaan dengan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan,memberikan alternative desain, pilihan investasu beserta pengelolaannya.

6. Mengumpulkan Informasi/Analisis Situasi

Bantuan bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang serta bagaimana mengoptimalkannya,selain mengidentifikasi kelemahan dan ancaman untuk mempermudah merumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya.

Pada hakekatnya tujuan partisipasi sesungguhnya adalah untuk memberdayakan masyarakat daerah setempat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian serta turut serta menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

2.1.2. Jenis-Jenis Partisipasi

Menurut Maran dalam Yuwono (2001:150) ada beberapa jenis partisipasi yang terdiri atas:

1. Partisipasi dalam partai politik yang terdiri dari partisipasi aktif dimana orang-orang yang bersangkutan menduduki jabatan – jabatan tertentu dalam suatu organisasi politik, memberikasn dukungn keuangan atau membayar iuran keanggotaan dan partisipasi pasif sebaliknya.
2. Partisipasi berupa mengikuti suatu rapat umum, demonstrasi yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik atau kelompok kepentingan untuk memenuhi agenda politiknya masing-masing.
3. Partisipasi yang bersifat singkat adalah diskusi informal yang dilakukan baik dalam keluarga, tempat kerja atau tempat lainnya.
4. Partisipasi yang tidak menuntut banyak upaya ialah ikut memberikan suara dalam suatu kegiatan pemungutan suara.

Menurut Chochelas dalam Supriatna (2000:83)(www.materibelajar.id) membagi partisipasi dalam 2 jenis yaitu:

1. Partisipasi teknis

Diartikan sebagai teknik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data dan mengimplementasikan data.

2. Partisipasi politik

Diartikan sebagai pemberian kekuasaan dan control kepada masyarakat, melalui pilihan-pilihan untuk beraksi, berotonomi, dan berefleksi terutama melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan.

Menurut Santoso dan Iskandar dalam Nikmatullah (1991:38)(www.materibelajar.id) bahwa partisipasi merupakan sumbangan yang diberikan orang atau kelompok, yaitu:

1. Merupakan buah pikiran yaitu menyumbangkan ide/gagasan, pendapat, partisipasi pengalaman untuk keberlangsungan suatu kegiatan.
2. Tenaga dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela.
3. Partisipasi harta benda, menyumbangkan materi berupa uang, barang dan penyediaan sarana atau fasilitas untuk kepentingan program.
4. Partisipasi keterampilan yaitu berupa pemberian bantuan skill yang dia miliki untuk mengembangkan program.
5. Partisipasi sosial yaitu keterlibatan dalam kegiatan – kegiatan sosial demi kepentingan bersama.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi juga merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi seutuhnya. Tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.

2.1.3. Teori Partisipasi menurut Para Ahli

Hetifah dalam Handayani (2006 : 39) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal. Histiraludin dalam Handayani (2006 : 39-40) menyatakan:

Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan.

Slamet (2003 : 8) menyatakan bahwa partisipasi Velderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi politik: lebih berorientasi pada mempengaruhi dan menduduki wakil rakyat, dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif itu sendiri.
2. Partisipasi sosial: partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahan pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga: menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA pemerintah, lembaga atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai

bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2.1.4. Bentuk Partisipasi

Conyers dalam Supriatna (2000 : 64) menyatakan, ada 2 bentuk partisipasi masyarakat penerima program pembangunan, yaitu :

1. Identifikasi masalah pembangunan

Suatu cara bagaimana kita melihat, menduga, memperkirakan dan menguraikan serta menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam pembangunan. Dengan maksud dan tujuan dari identifikasi tersebut adalah untuk mempercepat upaya pembangunan di Negara-negara berkembang.

2. Perencanaan pembangunan

Disamping partisipasi dalam pengambilan keputusan yang tak kalah penting adalah bagaimana perencanaan program pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan. Semakin terpusat perencanaan pembangunan dilakukan maka peranan kelompok swadaya masyarakat akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

2.2. Teori Pembangunan

Menurut Hadi (2001:21) Pembangunan memiliki makna ganda. Tipe pembangunan yang pertama lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya adalah pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Tipe kedua, pembangunan yang lebih memperhatikan pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial.

Tipe yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial dimana fokusnya

pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi dan meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan dari pembangunan pada seluruh masyarakat.

Todaro (2000:18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Todaro dalam (Nasution, 2008:40-41) definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 - a. *Life sustenance*: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. *Self-Esteem*: Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.
 - c. *Freedom From Survitude*: Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer, yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

12

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

1. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan *income* atau produktivitas.
2. *Equity*, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. *Sustainable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Dari pengertian pembangunan yang diungkapkan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Menurut Gant dalam Suryono, tujuan pembangunan ada dua tahap yaitu: *Pertama*, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, *Pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat

akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam

perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu negara. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada (tiga) pasal Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Menurut Siagian (2007:142), bahwa “tugas pembangunan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata”. Lebih lanjut Siagian (2007:153-154) mengatakan bahwa pembangunan nasional membutuhkan tahapan. Pentahapan biasanya mengambil bentuk periodisasi. Artinya, pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan.

Masyarakat desa adalah merupakan tanggung jawab nasional, tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa itu sendiri sebagai sub sistem pemerintahan di daerah. Berbagai permasalahan yang dialami dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa, menuntut agar sasaran pembangunan itu harus lebih banyak diarahkan di daerah pedesaan.

Menurut Utomo (1997:3) peran serta masyarakat dalam perencanaan adalah:

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan
- b. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan
- c. Pemberian masukan dalam perumusan Rencana Tata Ruang
- d. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan perencanaan
- f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan
- g. Bantuan tenaga ahli

Tujuan pembangunan desa itu sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat, bukan saja sebagai objek pembangunan, akan tetapi justru yang dituntut adalah ikut sertanya secara aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan. Menurut Supriyanto (2009:344) bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. Tentunya hal ini sangat relevan dengan cita-cita otonomi daerah yakni untuk mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Cara berpartisipasi ini dapat dikategorikan atas:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Artinya keputusan-keputusan untuk kepentingan umum yang dibuat pemerintah seyogyanya melibatkan masyarakat, sehingga keputusan-keputusan tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Keputusan-keputusan yang selama ini dinilai tidak bermanfaat, karena dibuat secara *top-down* tanpa melibatkan masyarakat.

2. Partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan

Dalam merencanakan pembangunan, agar tidak menyimpang perlu melibatkan masyarakat yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, seperti perencanaan pembebasan tanah masyarakat untuk pelebaran jalan, atau untuk pembangunan gedung sekolah, sarana kesehatan (rumah sakit ataupun puskesmas), gedung-gedung pemerintah, ataupun sarana dan prasarana publik lainnya.

3. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Dalam hal ini masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat, misalnya dalam pembangunan terminal, pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Untuk memastikan bahwa perencanaan sesuai dengan pelaksanaan, seluruh kegiatan harus dievaluasi. Evaluasi ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Efriadi (2010) yang menjadi indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah :

- a. Wujud atau dimensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat
- b. Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan
- c. Kesesuaian pembangunan daerah yang akan dilakukan dengan kebutuhan masyarakat
- d. Kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

2.4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/penelitian, dikarenakan instrument yang digunakan adalah metode-metode riset. Kejadiannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang di lapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004)

Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan formulasi rencana dan implementasinya, dapat diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Dengan demikian, rencana merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi berdasar pada suatu rencana.

Ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1998:49) yaitu:

1. Mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap
2. Meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Mengadakan perubahan struktur ekonomi.
4. Perluasan kesempatan kerja.
5. Pemerataan pembangunan.
6. Pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat.
7. Kemandirian pembangunan.
8. Stabilitas ekonomi.

Menurut Nasution (2008:105) Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahap awal, maka perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksana pembangunan (*action plan*) dan dapat ditetapkan (*aplikatif*).

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan (UU No. 25 tahun 2004), yakni:

1. Penyusunan rencana

Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing institusi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan yang terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan rencana

Penetapan rencana untuk menetapkan landasan hukum bagi rencana pembangunan yang dihasilkan pada tahap penyusunan rencana.

3. Pengendalian pelaksanaan rencana.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Indikator dari proses perencanaan adalah :

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan di desa. Tanpa tujuan yang jelas, sumber daya yang ada tidak akan dapat digunakan secara efektif.

2. Merumuskan keadaan saat ini

Pemahaman akan posisi desa sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan perencanaan menyangkut waktu yang akan datang.

3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuannya dalam mencapai tujuan.

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan

Tahapan akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan dan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada.

2.5. Definisi Musrenbang

Kata musrenbang ini merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari bahasa arab yang menggambarkan

bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga

problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu identik dengan diskusi di masyarakat/ Desa tentang kebutuhan pembangunan daerah. Musrenbang agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintahan di level yang lebih tinggi. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah keterlibatan atau keikutsertaan anggota masyarakat untuk secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up dimana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat local dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. (www.solokotakita.org).

2.5.1. Tujuan Musrenbang

Tujuan musrenbang adalah:

1. Menyetakati prioritas kebutuhan dan kegiatan termasuk urutan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan SKPD.
2. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang di biayai melalui dana swadaya masyarakat dan koordinasi oleh lembaga kemasyarakatan di Desa setempat.
3. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai dana bantuan dari pemerintah daerah (kota).

2.5.2. Prinsip Dalam Pelaksanaan Musrenbang

Prinsip dalam musrenbang berlaku baik untuk fasilitator, peserta, narasumber, dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang dan hendaknya menjadi kesepakatan bersama.

Berikut adalah prinsip prinsip dalam musrenbang,antara lain:

1. Prinsip kesetaraan, Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara,dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat.
2. Prinsip musyawarah dialogis, Peserta musrenbang memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya.
3. Prinsip keberpihakan
4. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.

2.5.3. Proses Musrenbang

1. Pra Musrenbang

Yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan adalah:

- a. Pembentukan tim penyelenggaraan musrenbang oleh Kepala Desa
- b. Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat dan masyarakat
- c. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang Desa
- d. Mempersiapkan bahan/materi untuk musrenbang Desa
- e. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat.
- f. Melakukan musyawarah dusun/RW
- g. Daftar prioritas masalah dari tingkat dibawah Desa
- h. Peta potensi dan permasalahan Desa.
- i. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa
- j. Informasi dari pemerintah kota tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Desa yang akan di alokasikan Desa yang bersangkutan.
- k. Informasi dari pemerintahan kota tentang isu-isu strategis daerah.
- l. Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah direalisasi
- m. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa pada tahun sebelumnya
- n. Daftar nama para wakil kelompok fungsionalwarga yang bekerja di kecamatan.

2. Pelaksanaan Musrenbang

- a. Pendaftaran peserta
- b. Kepala Desa mempresentasikan prioritas masalah Desa sesuai hasil Pra Musrenbang..

- c. Menyampaikan informasi tentang perkiraan jumlah dana alokasi Desa yang berasal dari pemerintahan kota.
- d. Menyampaikan informasi tentang isu-isu strategis kota
- e. Membahas pelaksanaan pembangunan Desa tahun sebelumnya termasuk mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya yang telah terealisasi
- f. Merumuskan kriteria bersama dalam menentukan prioritas untuk menyeleksi usulan
- g. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat.
- h. Pemisahan kegiatan
- i. Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta pendanaan sesuai dengan potensi serta permasalahan Desa
- j. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa yang akan diurung ke musrenbang kecamatan
- k. Musyswarah penentuan tim delegasi Desa dengan poses sebagai berikut:
 - 1) Penyampaian penyepakatan criteria tim delegasi Desa
 - 2) Penentuan calon dari peserta musrenbang Desa
 - 3) Penyampaian mandate yang diberikan kepada tim delegasi
 - 4) Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta
- l. Berita acara musrenbang tahunan

3. Nara Sumber

a. Kepala Desa

b. Pegawai di Desa

- c. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat setempat.

4. Partisipasi Musrenbang

Seluruh komponen masyarakat yang berada di Desa seperti:

- a. Ketua RT/RW
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- c. Kelompok perempuan
- d. Organisasi masyarakat

5. Pasca Musrenbang

Tim delegasi bersama dengan tim penyelenggaraan musrenbang melakukan:

- a. Rapat kerja financial dokumen renja SKPD Desa
- b. Penyusunan daftar prioritas kegiatan penibangunan swadaya Desa
- c. Daftar prioritas permasalahan pembangunan Desa.

2.6. Desa

2.6.1. Pengertian Desa

Menurut Widjaja (2001:42) posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa, maka dalam pengembangan peran serta masyarakat, pemerintah desa selaku Pembina, pengayoni dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa secara umum menurut Daldjoeni (2003:53) adalah pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berjiwa agraris, sedangkan desa dalam artian administratif menurut Karthohadikusumo dalam Daldjoeni (2003:54) yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan pembentukan desa sebagai mana yang dimaksud harus memenuhi syarat:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat, dan
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan

2.6.2. Pemerintahan Desa

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. Desa di Kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Desa sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan perda.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekdes dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan taia cara pemilihan diatur oleh perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2005:138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
- d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya dan gotong royong masyarakat
- e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan antar masyarakat
- g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada desa

Berdasarkan Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pertama, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Kedua, urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Ketiga, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Menimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang

ditentukan bersama BPD
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Akadun (2011) berbagai faktor memengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi regional. Salah satunya adalah kualitas perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang ideal semestinya mampu mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, adanya keterlibatan publik dalam perencanaan, antara lain melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), struktur birokrasi, dan partai politik. Tulisan ini menganalisis perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari kebijakan publik. Kelemahan internal maupun eksternal dalam aspek perencanaan yang didapati sesungguhnya dapat diatasi dengan menyusun kerangka hukum dan instrumen perundang-undangan lainnya sebagai panduan mekanisme dan proses partisipasi publik guna menjamin pelaksanaan *goodgovernance*.

Hasil penelitian Pengaruh implementasi kebijakan musrenbang terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah signifikan. Meskipun besarnya pengaruh tersebut hanya 29,92 %, akan tetapi hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi peran partisipasi terhadap mutu perencanaan pembangunan daerah sangat penting terutama apabila wadah partisipasi tersebut (Musrenbang) memerhatikan komunikasi, sumberdaya, perilaku pelaksana, dan struktur birokrasi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih terdapat banyak kelemahan terutama melalui jalur Musrenbang. Hal ini disebabkan usulan program/proyek masyarakat melalui musrenbang tidak memiliki kepastian akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah melewati proses legalisasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Realitas menunjukkan telah terjadi kebohongan publik dan pelanggaran etika berdemokrasi dalam forum musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik.

Hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*, pelaksanaan musrenbangkel telah sesuai dengan pedoman dan sasaran yang ditetapkan dimana dalam pelaksanaannya terbuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan di Desa melalui aktor masyarakat. *Kedua*, Bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel Kotabaru Tengah pada tahun 2013 dari segi kehadiran peserta sudah representatif. Desa Kotabaru Tengah dalam perencanaan pembangunan yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan pembangunan dan menangani permasalahan di Desa Kotabaru Tengah. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sudah bersifat dua arah, dalam pemberian informasi sudah mulai diberikan jauh-jauh hari namun

penyebutan secara formal masih terbatas dengan waktu. Masyarakat terlibat

dalam proses penyusunan/perumusan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa Kotabaru Tengah, namun tidak ada sarana dalam melakukan kontrol dan pengawasan bagi masyarakat dalam Musrenbangkel. Masyarakat telah dapat memberikan usulan sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan mereka, dalam penentuan skala prioritas ditentukan oleh peserta rapat dengan tim pelaksana Musrenbangkel dalam diskusi. Pengambilan keputusan realisasi kegiatan tetap ditangan pemerintah, akan tetapi masih minimnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah. *Ketiga*, peran pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan Musrenbangkel memiliki peran sebagai regulator untuk melahirkan kebijakan-kebijakan dan mekanisme-mekanisme perencanaan yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat serta untuk menciptakan ruang partisipasi. Sementara itu peran pemerintah kecamatan berfungsi sebagai motifator, fasilitator, monitoring dan evaluasi. Pemerintah Desa dalam musrenbangkel sendiri berperan sebagai sosialisasi dan pelaksana musrenbang Desa.

Penelitian juga dilakukan oleh Arina, dkk (2013) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dimana perencanaan pembangunan desa disini diwujudkan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau seringkali disebut Musrenbangdes. Derajat partisipasi masyarakat diukur dengan tangga partisipasi baru menurut Khairul Muluk yang terdiri dari enam anak tangga yaitu manipulasi, informasi, konsultasi, kemitraan, delegasi dan kendali warga. Pengukuran derajat partisipasi masyarakat berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh manakah

tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tangga partisipasi, selanjutnya dapat

digunakan sebagai evaluasi terhadap penyelenggaraan Musrenbangdes apakah telah melibatkan masyarakat secara maksimal atau belum. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta data yang diperoleh oleh peneliti, diperoleh suatu hasil penelitian dimana diketahui bahwa derajat partisipasi masyarakat baik pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan berada pada tingkat derajat partisipasi Konsultasi dimana partisipasi jenis ini dikategorikan partisipasi tingkat SEDANG.. Partisipasi konsultasi merupakan mekanisme partisipasi yang menjelaskan bahwa telah dilakukan jejak pendapat atau diskusi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan, namun keputusan akhir dari perencanaan pembangunan yang akan menjadi prioritas pembangunan tetap berada pada kekuasaan pemerintah desa atau pemerintah di atasnya.

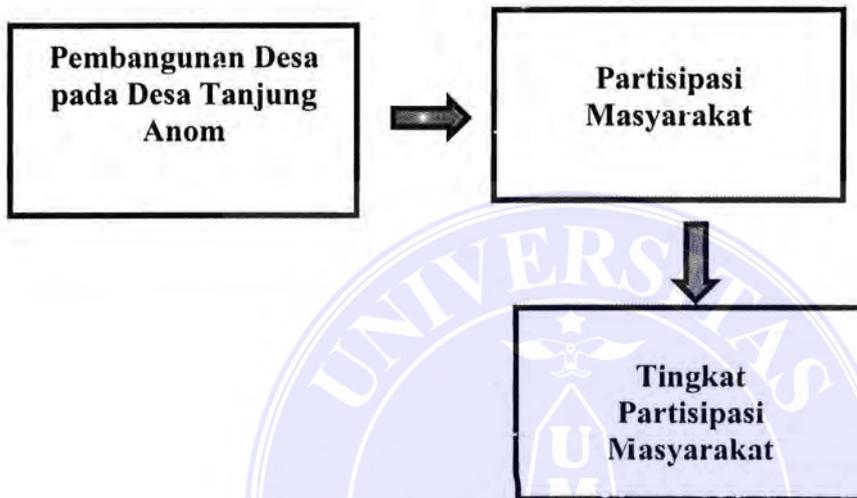
2.8. Kerangka Pemikiran

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah keterlibatan atau keikutsertaan anggota masyarakat untuk secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna sehingga tidak mungkin dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti kuesioner dan tes. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data dalam Creswell (2010:5).

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. Penelitian ini saya lakukan pada bulan November sampai dengan bulan Januari 2017.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang dipilih adalah orang-orang yang berperan aktif dalam kegiatan Musrenbang di daerah ini, antara lain adalah:

1. Informan kunci, Kepala Desa Tanjung Anom
2. Informan utama, Pegawai di Desa
3. Informan tambahan, Tokoh Masyarakat & Masyarakat setempat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dengan observasi kita mendapatkan data dengan cara terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid.

2. Wawancara mendalam

Adalah suatu cara mengumpulkan data atau informan dengan cara langsung bertatap muka dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi data yang lengkap dan relevan.

3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting.

4. Triangulasi sumber data

Dalam pengumpulan data ini memakai triangulasi sumber data, yaitu selain menggunakan wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan dokumen tertulis, catatan pribadi, catatan remi sehingga menghasilkan bukti atau data yang berbeda.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh dilapangan serta bahan bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif. Teknik analisis data

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan.

3.5.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada rata-rata yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

3.5.2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3.5.3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal kelengkapan serta dalam proses pengumpulan data penelitian berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari data yang telah terkumpul.

3.6. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Data hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya melalui lama penelitian, observasi yang detail, analisis membandingkan dengan hasil penelitian.

2. Uji Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti dalam membuat

laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian yang telah didapat sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian diaplikasikan ditempat lain.

3. Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji Confirmability

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan seperti berikut ini.

1. Partisipasi

- Pada Musrenbang Desa Tanjung Anom beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat masih sangat rendah tingkat partisipasinya.
- Kesadaran masyarakat yang sangat kurang dalam jalannya proses Musrenbang pada Desa Tanjung Anom.
- Karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang pada Desa Tanjung Anom, maka kegiatan Musrenbang pada Desa Tanjung Anom pada tahun 2016 tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Hambatan

- Faktor rendahnya partisipasi
- Masyarakat di Desa Tanjung Anom sebagian besar masih memiliki anggapan bahwa peraturan yang berhubungan dengan pembangunan adalah urusan dari pusat maupun daerah, dan mereka juga beranggapan bahwa ini adalah bukan urusan mereka. Sedangkan masyarakat yang awam dengan dunia politik lebih cocok tidak terlibat didalam peraturan tersebut yang dimana masyarakat lebih fokus kepada hasilnya tanpa mereka mengetahui bagaimana proses berjalannya Musrenbang.

5.2. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simple dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip prinsip partisipatif.
2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa, unsur pembagian dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Desa Tanjung Anom. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses Musrenbang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Daldjoeni, N. 2003. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: PT. Alumni.
- Davis, Keith dan Newstrom, John W. 2004. *Perilaku dalam Organisasi*, Edisi 7 Bahasa Indonesia, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hadi, Sudharto P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi Muclis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses Analisa dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Handayani Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Surakarta: Kompip Solo
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Arifin. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Medan: FISIP USU Press.
- Nasution, Arifin. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Medan: FISIP USU Press.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Panudju, Agung. 2003. *Pengaruh Kompensasi dan Karakteristik Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan unit PT.X Palembang*. *Jurnal Manajemen dan bisnis Sriwijaya*.
- Riyadi & Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Safi'i, M. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perespektif Teoritik*. Malang: Averroes Press.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama, Cetakan Keempat Belas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta: LP3ES.

- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Supriatna Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineke Cipta. Jakarta
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pererintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: CV. Media Berlian.
- Suryono Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang : Universiti Negeri Malang UM Press
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tjiptoherijanto, Prijono & Said Z. Abidin. 1993. *Reformasi Administrasi Dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1998. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Warsito, Utomo. 1997. *Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 1.
- Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo. R dan Nugroho. 2006. *Manajemen pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti

Jurnal :

Akadun. 2011. Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal MIMBAR*, Vol. XXVII, No. 2 : 183-191 'Terakreditasi' SK Dikti No. 64a/DIKTI/Kep/2010 183

Arina Hidayah,. Inti Wasiati, Dina Suryawati. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember). Arikel Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)

Fathurrahman Fadil. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013*

Peraturan dan Undang-Undang:

Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*.

Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008*.

Peraturan Desa Sambirejo Nomor 01 Tahun 2016 Tentang *Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa)*.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/ BANGDA/2008 Tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)*

Internet.

<http://www.materibelajar.id/2015/12/tujuan-dan-jenis-partisipasi-masyarakat.html>